



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA JAYAPURA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan rahmat-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban sebagaimana yang diinstruksikan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisa capaian kinerja kegiatan dan sasaran.

Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja berarti tuntutan perubahan pola pikir dari aparatur. Karena kinerja pemerintah akan sangat sulit berubah apabila kita tidak mampu melakukan transformasi sistem pemerintahan dari sistem yang birokratis kearah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirauasakan birokrasi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi oleh masing-masing bidang. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui pendekatan koordinasi. Mudah-mudahan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk memacu peningkatan kinerja aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura pada tahun-tahun berikutnya.

Jayapura, 15 Februari 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA JAYAPURA


ASEP AKBAR M. KHALID, ST., M. Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19770214 201004 1 00

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura sebagai implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Namun pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura. merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perencanaan Strategis, yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura.

Pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah kepada Publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintahan, melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan serta fungsi pengawasan publik terhadap jalannya Pemerintahan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura. untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura. Tahun 2023 – 2026.

Pengukuran pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (Performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result). Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura. apabila terjadi perbedaan antara rencana kinerja dengan realisasinya maka harus dicari penyebabnya dan menentukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

Tahun 2023 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura. periode tahun 2023-2026. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura. Tahun 2023 ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sebagai berikut :

1. Pada tahun 2023 telah dapat direalisasikan dengan baik. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh dari Kepala Pelaksana dan staf Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura. di samping adanya koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait
2. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2023-2026 yang secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik

Keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai selama tahun 2023 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura. untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF..... | iii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Gambaran Umum Organisasi | 1 |
| 1.2. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Oleh Instansi | 10 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 11 |
| 2.1. Rencana Strategis | 11 |
| 2.2. Progam dan Kegiatan | 14 |
| 2.3. Perjanjian Kinerja | 20 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 24 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi..... | 19 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 52 |
| | |
| LAMPIRAN | 54 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

A. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura, mengatur tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Jayapura sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggara penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran pendapatan belanja negara;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Daerah.

2. Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dalam menyelenggarakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

B. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka susunan Struktur dan Organisasi untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah, membawahi :
 - 1) Instansi;
 - 2) Profesional / Ahli;
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - 1) Kepala Pelaksana
 - 2) Sekretariat; yang membawahi :
 - a) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
 - b) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - c) Sub Bagian Keuangan;
- d. Bidang – bidang terdiri dari :
 - 1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - a) Sub bidang Pencegahan, dan
 - b) Sub bidang Kesiapsiagaan



- 2) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - a) Sub bidang Kedaruratan, dan
 - b) Sub bidang Logistik
- 3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - a) Sub bidang Rehabilitasi, dan
 - b) Sub bidang Rekonstruksi

Dari Struktur Organisasi tersebut masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura mempunyai **tugas** melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- Pra Bencana
- Saat Tanggap Darurat, dan
- Pasca Bencana

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Pelaksana menyelenggarakan **fungsi** :

- Pengkoordinasian
- Pengkomandoan, dan
- Pelaksanaan

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai **tugas** :

- Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.



Sekretaris mempunyai **fungsi** :

- a) Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan merumuskan kebijakan dilingkungan BPBD;
- b) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatusahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan

Untuk Sub Bagian tugas-tugasnya sebagai berikut :

1) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi

Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a) Mengumpulkan bahan sebagai data awal dalam menjalankan program;
- b) Melakukan evaluasi terhadap setiap program yang berjalan untuk mencapai hasil yang tepat guna.

2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan Urusan Administrasi Kepegawaian;
- b) Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Kantor;
- c) Melaksanakan Administrasi Umum Lainnya.

3) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan Administrasi Keuangan;
- b) Mengurus penerimaan, menyimpan dan membayar uang Operasi BPBD;
- c) Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan asset;

d) Menyimpan arsip Keuangan.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat
- b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- c) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- d) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

1) Sub Bidang Pencegahan

Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas :

- a) Merumuskan kebijakan dibidang pencegahan bencana;
- b) Mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan;
- c) Melaksanakan hubungan kerja dengan Instansi atau Lembaga terkait dibidang Pencegahan Bencana;
- d) Memantau, mengevaluasi, dan membuat laporan analisa tentang pelaksanaan kebijakan dibidang Pencegahan.

2) Sub Bidang Kesiapsiagaan

Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas :

- a) Merumuskan kebijakan dibidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada

prabencana serta memberdayakan masyarakat;

- b) Berkoordinasi dalam pelaksanaan kebijakan mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta memberdayakan masyarakat;
- c) Melaksanakan hubungan kerja dengan Instansi terkait dalam hal kesiapsiagaan pada prabencana serta memberdayakan masyarakat.

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Fungsi bidang kedaruratan dan logistik :

- a) Perumusan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c) Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d) Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e) Pemantauan, evaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

1) Sub Bidang Kedaruratan

Sub Bidang Kedaruratan mempunyai tugas :

- a) Merumuskan Kebijakan Umum dibidang Penanggulangan Bencana pada saat darurat;
- b) Mengkoordinasi saat Pelaksanaan Kebijakan dibidang

Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat;

- c) Melakukan Komando Pelaksanaan Kebijakan dibidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat;
- d) Melakukan hubungan kerja dibidang Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat;
- e) Melakukan Pemantauan, Evaluasi dan Analisi pelaporan tentang Pelaksanaan Kebijakan dibidang Penanggulangan Bencana pada saat darurat.

2) Sub Bidang Logistik

Sub Bidang Logistik mempunyai tugas :

- a) Merumuskan kebijakan umum dibidang Penanggulangan Bencana saat penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b) Melakukan koordinasi dalam melakukan kebijakan Penanggulangan Bencana saat Penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c) Melakukan hubungan kerja dengan Instansi terkait dibidang penanggulangan bencana saat penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- d) Melakukan Pemantauan, Evaluasi dan Analisis pelaporan tentang Pelaksanaan Kebijakan dibidang Penanggulangan Bencana saat penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;



- b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c) Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

1) Sub Bidang Rehabilitasi

Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas :

- a) Merumuskan Kebijakan Penanggulangan Bencana pada Pasca bencana guna merehabilitasi kondisi yang dihadapi masyarakat korban bencana;
- b) Membangun Koordinasi dan Kerjasama dalam merehabilitasi kondisi masyarakat korban bencana;
- c) Melakukan Pemantauan, Evaluasi dan Analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum guna tercapainya proses rehabilitasi.

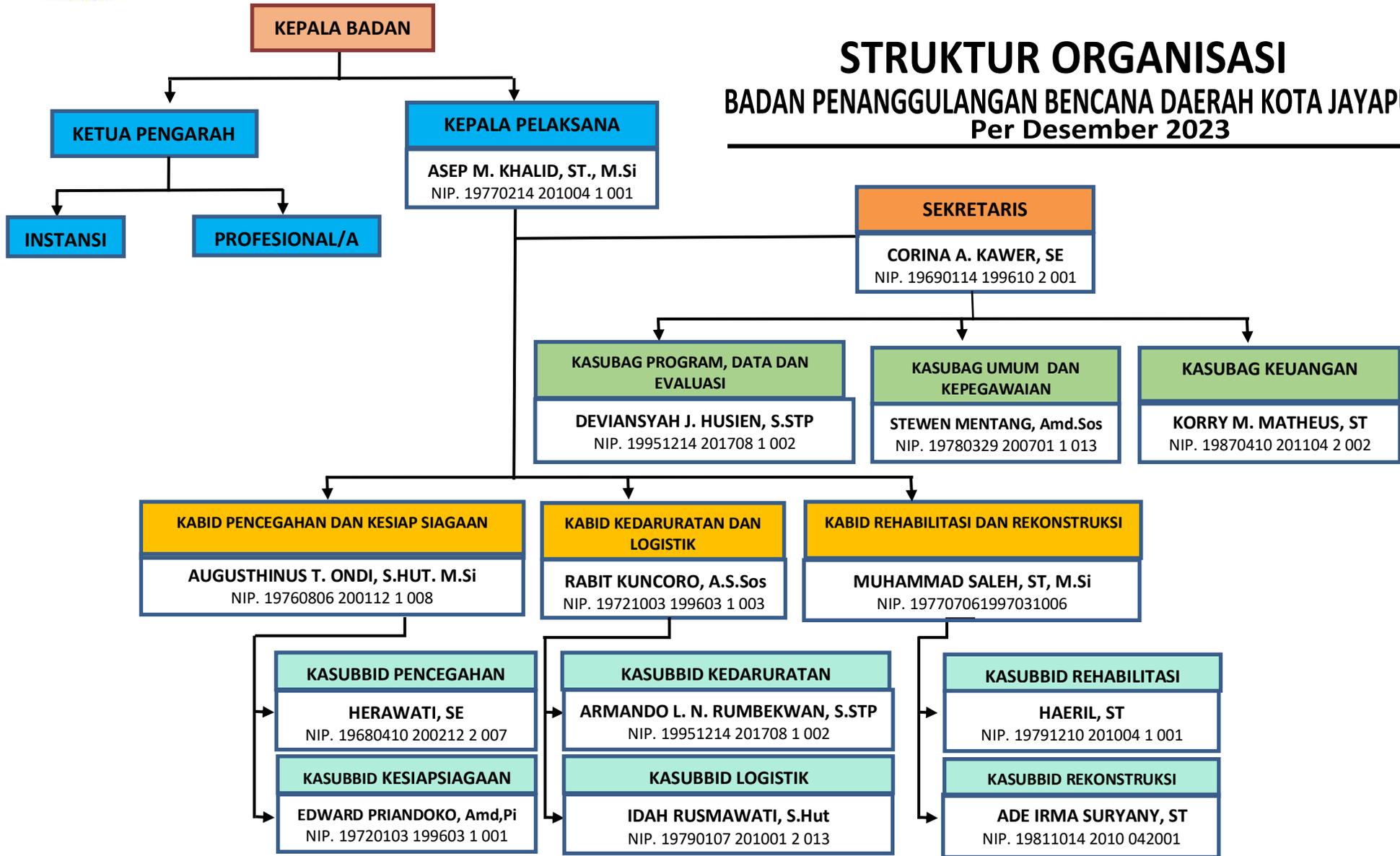
2) Sub Bidang Rekonstruksi

Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas :

- a) Merumuskan Kebijakan Penanggulangan Bencana guna merekonstruksi kondisi daerah yang terkena bencana;
- b) Melakukan koordinasi dalam melaksanakan kebijakan Rekonstruksi Pasca bencana.



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA JAYAPURA Per Desember 2023



1.2. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OLEH INSTANSI

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dalam menjalankan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 dalam mencapai sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya tenaga teknis dari BPBD Kota Jayapura yang berpengalaman dalam bidang penanggulangan bencana.
- b. Terbatasnya kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jayapura khususnya dalam penganggaran terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- c. Belum terbentuknya unit Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kota Jayapura, sehingga pengelolaan data dan pemberian informasi kepada masyarakat melalui media belum berjalan optimal.
- d. Koordinasi antar instansi khususnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana belum optimal.
- e. Kurangnya peralatan dan logistik untuk penanganan dan penyelamatan korban bencana, sehingga dalam upaya penanganan korban belum maksimal.
- f. Belum lengkapnya dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Kontijensi) dari tingkat Kota hingga ke Kelurahan/Kampung yang berketetapan hukum.
- g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam usaha pencegahan dini terhadap penanggulangan bencana.
- h. Relawan-relawan untuk penanggulangan bencana di tingkat kelurahan/kampung masih terbatas.
- i. Kerjasama dengan NGO atau Lembaga-lembaga masyarakat pemerhati kebencanaan masih minim.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura Tahun 2023 – 2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jayapura Tahun 2005 – 2025, dimana berisi tujuan, sasaran, program, indikator kinerja utama, indikator kinerja program serta kegiatan yang akan dilaksanakan, disesuaikan dan memiliki benang merah dengan substansi RPJMD Kota Jayapura dimaksud.

Adapun rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura Tahun 2023 – 2026 adalah :

**“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA JAYAPURA YANG PEKA,
TANGGAP DAN TANGGUH MENGHADAPI BENCANA “.**

Adapun tujuan dari Peka, Tanggap dan Tangguh adalah :

- ❖ **PEKA** mempunyai makna mampu dan jeli melihat tanda-tanda awal bahaya bencana
- ❖ **TANGGAP** mempunyai makna tidak panik dan cepat mengambil langkah-langkah penyelamatan pada saat terjadinya bencana
- ❖ **TANGGUH** mempunyai makna kesiapan dalam menghadapi bencana, serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelah bencana.

Dari tujuan tersebut juga dapat diartikan bahwa usaha pengurangan dan pencegahan terhadap risiko bencana, serta penanganan bencana tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh semua elemen masyarakat guna meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi



bencana.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Rumusan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura Tahun 2023 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 1. berikut :

Tabel 1.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA JAYAPURA
TAHUN 2023 – 2026

| TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | SATUAN | TARGET INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE- | | | |
|---|------------------------------|--------|---|--------|--------|--------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Terwujudnya Kota Jayapura yang bersih, indah, lestari, manusiawi, aman dan nyaman | Indeks Risiko Bencana | | 141,08 | 141,08 | 139,53 | 139,53 |
| ✓ Meningkatnya Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan | Indeks Ketahanan Daerah | | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,84 |
| Terbangunnya Tata Pemerintahan yang baik | Indeks Reformasi Birokrasi | Persen | 45,85 | 45,90 | 46,25 | 46,50 |
| ✓ Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | Persen | 86,08 | 87 | 88 | 89 |
| ✓ Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan | Penilaian LAKIP | Persen | 70 | 75 | 80 | 85 |



2.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Setiap sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dijabarkan ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023 terdiri atas 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 18 (Delapan belas) sub kegiatan.

Target ditetapkan untuk setiap indikator kerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan (input, output dan outcome). Ikhtisar Rencana Kinerja 2023 dapat di jabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.
PENETAPAN KINERJA BPBD KOTA JAYAPURA
TAHUN 2023

| No. | Sub Kegiatan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Anggaran Sebelum Perubahan (Rp) | Anggaran Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah / (Berkurang) (Rp) |
|--|---|------------------------|---|----------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | |
| 1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ASN BPBD Kota Jayapura | Jumlah pegawai yang terlayani pembayaran gaji dan tunjangan | 31 Orang | 3.024.583.000,00 | 3.063.471.000,00 | 38.888.000,00 |
| Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | |
| 2. | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | ASN BPBD Kota Jayapura | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 34 Stell | 32.402.000,00 | 40.982.000,00 | 8.580.000,00 |
| 3. | Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi | ASN BPBD Kota Jayapura | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan | 2 Orang | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | |
| 4. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ASN BPBD Kota Jayapura | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 12 Paket | 51.643.200,00 | 95.066.600,00 | 43.423.400,00 |
| 5. | Penyediaan bahan logistik kantor | ASN BPBD Kota Jayapura | Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan | 2 Paket | 56.500.000,00 | 123.750.000,00 | 67.250.000,00 |



BPBD Kota Jayapura

| | | | | | | | |
|----|--|------------------------|--|-----------|---------------|---------------|------|
| 6. | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | ASN BPBD Kota Jayapura | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan | 3 Paket | 16.154.000,00 | 16.154.000,00 | 0,00 |
| 7. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | ASN BPBD Kota Jayapura | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 1 dokumen | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |



| No. | Kegiatan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Anggaran Sebelum Perubahan (Rp) | Anggaran Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah / (Berkurang) (Rp) |
|---|---|------------------------------------|--|------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 8. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ASN BPBD Kota Jayapura | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | 216.652.800,00 | 271.378.400,00 | 54.725.600,00 |
| Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | |
| 9. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | ASN BPBD Kota Jayapura | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 2 laporan | 28.554.000,00 | 28.554.000,00 | 0,00 |
| 10. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ASN dan Honorer BPBD Kota Jayapura | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 3 Laporan | 176.064.000,00 | 181.664.000,00 | 5.600.000,00 |
| Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | |
| 11. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ASN BPBD Kota Jayapura | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 2 Unit | 20.614.000,00 | 20.614.000,00 | 0,00 |
| 12. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Operasional atau lapangan | ASN BPBD Kota Jayapura | Jumlah kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perijinannya | 4 Unit | 30.430.000,00 | 50.851.000,00 | 20.421.000,00 |
| | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|------------------------|--|---------|--------------|--------------|------|
| 13. | Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya | ASN BPBD Kota Jayapura | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 10 Unit | 6.450.000,00 | 6.450.000,00 | 0,00 |
|-----|--------------------------------------|------------------------|--|---------|--------------|--------------|------|

| No. | Kegiatan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Anggaran Sebelum Perubahan (Rp) | Anggaran Setelah Perubahan (Rp) | Bertambah / (Berkurang) (Rp) |
|---|--|---|--|-----------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Program Penanggulangan Bencana | | | | | | | |
| Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | | | | | | | |
| 14. | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana | Jumlah warga negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | 50 Warga | 145.000.000,00 | 259.800.000,00 | 114.800.000,00 |
| 15. | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | ASN BPBD Kota Jayapura | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | 1 Laporan | 98.256.000,00 | 98.256.000,00 | 0,00 |
| 16. | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Masyarakat yang terkena dampak bencana | Jumlah dokumen penanganan pascabencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana | 1 Dokumen | 393.280.000,00 | 1.396.274.540,00 | 1.002.994.540,00 |



BPBD Kota Jayapura

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 17. | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi (TRC) Bencana Kabupaten /Kota | Anggota TRC Kota Jayapura | Jumlah personal TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya | 30 orang | 170.000.000,00 | 170.000.000,00 | 0,00 |
| Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | | | | |
| 18. | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota | Masyarakat korban bencana | Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 150 KK | 145.000.000,00 | 145.000.000,00 | 0,00 |
| Jumlah Keseluruhan Anggaran Kegiatan 2023 | | | | | 4.624.583.000,00 | 5.981.265.540,00 | 1.356.682.540,00 |

2.3. PERJANJIAN KINERJA**A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sebelum Perubahan****PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA JAYAPURA**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|------------|
| 1. | Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan | Cakupan pelayanan urusan pemerintahan dan keuangan yang baik | 100% |
| 2. | Meningkatnya ketangguhan dan kualitas penanggulangan bencana | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | 50 Orang |
| | | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | 1 Laporan |
| | | Sarana dan prasarana yang dipulihkan pasca bencana | 1 Kegiatan |
| | | Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya | 30 Orang |
| | | Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 150 KK |



| Program | Anggaran | Keterangan |
|---|----------------------|-------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 3.673.047.000,00 | Sumber Dana : DAU |
| 2. Program Penanggulangan Bencana | Rp. 951.536.000,00 | Sumber Dana : DAU |

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Setelah Perubahan**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA JAYAPURA**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|------------|
| 1. | Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan | Cakupan pelayanan urusan pemerintahan dan keuangan yang baik | 100% |
| 2. | Meningkatnya ketangguhan dan kualitas penanggulangan bencana | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | 50 Orang |
| | | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | 1 Laporan |
| | | Sarana dan prasarana yang dipulihkan pasca bencana | 4 Kegiatan |
| | | Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya | 30 Orang |
| | | Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 150 KK |



| Program | Anggaran Setelah Perubahan | Keterangan |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota | Rp. 3.911.935.000,00 | Sumber Dana : DAU, DBH dan SILPA |
| 4. Program Penanggulangan Bencana | Rp. 2.069.330.540,00 | Sumber Dana : DAU dan DBH |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/ program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis berdasar pada kelompok indikator sesuai peran dan fungsi instansi teknis dibidang kebencanaan.

Pengukuran capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura Tahun 2022 dapat dilihat sesuai dengan Tabel berikut.

Tabel 4. Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja (%) | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | $91 \leq 100$ | Sangat tinggi |
| 2. | $76 \leq 90$ | Tinggi |
| 3. | $66 \leq 75$ | Sedang |
| 4. | $51 \leq 65$ | Rendah |
| 5. | ≤ 50 | Sangat Rendah |

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target indikator kinerja.



Pada Tahun 2023, untuk capaian kinerja yang maksimal tentu merupakan hal yang tidak mudah untuk diperoleh oleh Pemerintah Daerah Kota Jayapura terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura. Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dianalisis dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Adapun pencapaian kinerja terhadap target indikator kinerja BPBD Kota Jayapura Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 5. berikut :

Tabel 5.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja
TAHUN 2023

| No. | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Presentase |
|--|---|------------|--|------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | |
| 1. | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 34 stell | 34 Stell Baju Batik Tradisional Dan 6 stell PDH | 100 % |
| 2 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 2 Orang | 0% | 0% |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | |
| 1. | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 12 paket | 12 Paket | 100 % |
| 2. | Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan | 2 paket | BBM Peralite & Dextrite serta Bahan makanan pencegahan Stuting | 100 % |
| 3. | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan | 3 paket | 3 Paket (Fotocopi, Penjilidan, Map dan Brosur) | 100 % |
| 4. | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 1 dokumen | 1 dokumen (Koran Cenderawasih Pos) | 100 % |
| 5. | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 laporan | 20 Laporan | 100% |



| No. | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Presentase |
|---|--|-----------|--|------------|
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| 1. | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 2 laporan | 2 Laporan (Tagihan Telepon dan Internet) | 100 % |
| 2. | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 3 laporan | 3 Laporan | 98,00 % |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| 1. | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 2 Unit | 2 Unit | 95,00 % |
| 2. | Jumlah kendaraan perorangan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perijinannya | 4 Unit | 4 Unit | 98,00 % |
| 3. | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 10 Unit | 10 Unit | 100 % |



| No. | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Presentase |
|---|--|-----------|--|------------|
| PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | | | | |
| Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | | | | |
| 1. | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kab./Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | 50 orang | 50 Warga negara mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana di distrik Jayapura utara (Tercapai) | 100 % |
| 2. | Jumlah Laporan layanan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) dengan jenis ancaman bencana yang ada di Kawasan tempat tinggalnya | 1 Laporan | 1 Laporan Bencana, 123 Bulan (Tercapai) | 100 % |
| 3. | Jumlah dokumen penanganan pascabencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana | 1 Dokumen | 1 Dokumen, 4 Lokasi (Tercapai) | 100 % |
| 4. | Jumlah personal TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya | 30 orang | 30 Orang Personil TRC (Tercapai) | 100 % |
| Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | |
| 1. | Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 150 KK | 150 KK Penerima Bantuan Logistic Bencana (Tercapai) | 100 % |



Dari tabel pengukuran kinerja di atas dapat dijelaskan hasil capaian indikator kinerja BPBD Kota Jayapura Tahun 2023 sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Kegiatan ini adalah pengadaan pakaian Batik Tradisional dan PDH yang diperuntukkan untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan BPBD Kota Jayapura, dengan pagu dana Rp. 40.982.000,00

Realisasi capaian kinerja dari kegiatan ini 34 stell Baju batik tradisional dan 6 stell PDH (100%).

Realisasi Keuangan sebesar Rp. 40.982.000,00 (100 %)

b. Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan Sertifikasi Pengadaan barang dan Jasa yang diperuntukkan untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan BPBD Kota Jayapura dengan pagu dana Rp. 10.000.000,00 Realisasi Kinerja dan anggaran tidak tercapai karena Pegawai mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh BKPP Kota Jayapura sehingga tidak mengeluarkan Biaya/Anggaran

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini merupakan penyediaan alat tulis kantor, seperti kertas, buku agenda, map, binder clip, clip paper, stapler, bolpoint, tinta print, lem, amplop, materai dan alat tulis lainnya, penyediaan masker dan handsanitizer, bahan pembersih ruangan kantor, serta penyediaan, computer, Modem,UPS,Layar Proyektor, dan mesin printer, yang digunakan untuk mendukung aktivitas perkantoran dengan Pagu Dana sebesar Rp.95.066.600,00

Realisasi capaian kinerja dari kegiatan ini 100 %.

Realisasi Keuangan Rp.95.066.200,00 (99,99%)

b. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan ini merupakan penyediaan bahan logistik kantor, meliputi pembelian bahan bakar minyak seperti Pertalite dan Dexlite yang digunakan untuk menunjang pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan dinas

jabatan dan operasional BPBD Kota Jayapura serta Tersedianya Bahan makanan dalam rangka pencegahan stunting (Telur Ayam, Kacang hijau, susu formula balita, susu formula anak, beras) dengan pagu dana sebesar Rp. 123.750.000,00

Realisasi capaian kinerja dari kegiatan ini sebesar 100 %.

Realisasi Keuangan sebesar Rp.123.750.000,00 (100%)

c. Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan ini meliputi pembayaran cetak atau penggandaan, seperti fotocopy untuk mendukung kegiatan perkantoran. Dengan pagu dana Rp.16.154.000,00

Realisasi capaian kinerja dari kegiatan ini sebesar 100 %.

Realisasi Keuangan sebesar Rp.16.154.000,00

d. Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini meliputi pembayaran langganan bulanan surat kabar Cenderawasih Pos yang berguna untuk menambah informasi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPBD Kota Jayapura. Dengan pagu dana sebesar Rp.3.000.000,00

Realisasi capaian kinerja dari kegiatan ini sebesar 100%.

Realisasi Keuangan Sebesar Rp.3.000.000,00 (100%)

e. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini meliputi perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan luar daerah dari ASN di lingkungan BPBD Kota Jayapura. Perjalanan dinas dalam daerah bertujuan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan OPD-OPD terkait kebencanaan, melakukan monitoring lapangan.

Perjalanan dinas luar daerah bertujuan untuk mengikuti Rapat Koordinasi Nasional BNPB di Jakarta yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan kebencanaan ataupun koordinasi dengan BNPB dan seluruh BPBD se-Indonesia. Selain itu, perjalanan dinas luar daerah lainnya adalah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BNPB terkait usulan-usulan kegiatan dan anggaran, dan mengikuti Kegiatan Bulan Bakti Pengurangan Risiko Bencana di Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh BPBD di Provinsi/Kota/Kabupaten seluruh Indonesia, organisasi sosial, kelompok-kelompok masyarakat peduli bencana hingga organisasi Internasional.

Adapun capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah sebesar 100%.



Untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 239.416.000,00 (88,22%)

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini meliputi pembayaran tagihan telepon (Kartu Halo) dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Jayapura dan pembayaran jasa internet Indihome yang digunakan oleh BPBD Kota Jayapura untuk mendukung aktivitas perkantoran.

Dengan pagu dana sebesar Rp.28.554.000,00

Realisasi capaian kinerja dari kegiatan ini sebesar 100%.

Realisasi Keuangan sebesar Rp.18.848.400,00 (66,00)

b. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan ini meliputi belanja makanan dan minuman saat rapat, melakukan jamuan tamu dalam rangka koordinasi dan konsultasi, serta belanja snack/kudapan untuk aktivitas lapangan (seperti : kerja bakti).

Selain itu juga kegiatan ini untuk pembayaran atas jasa tenaga administrasi (honorarium pegawai tidak tetap), meliputi supir dan tenaga kebersihan, guna mendukung aktivitas operasional pimpinan dan memberikan kenyamanan di lingkungan kantor, termasuk pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk pegawai honorarium tersebut,

Untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN tidak dibayarkan dengan Pagu dana Rp.181.664.000,00

Realisasi capaian kinerja dari kegiatan ini sebesar 98,00 %.

Realisasi Keuangan sebesar Rp. 175.552.800,00 (96,63%)

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas serta pembelian suku cadang kendaraan (Ban Mobil) dan pembayaran pajak atas kendaraan dinas.dengan pagu dana Rp.20.614.000,00

Realisasi capaian kinerja dari kegiatan ini 95,00 %.



Realisasi Keuangan Rp. 18.114.000,00 (87,87%)

b. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas Operasional/Lapangan serta pembelian suku cadang kendaraan (Ban Mobil) dan pembayaran Pajak Kendaraan Operasional/Lapangan. Dengan pagu dana Rp. 50.851.000,00

Realisasi capaian kinerja dari kegiatan ini 98,00 %.

Realisasi Keuangan Rp. 46.728.000,00 (91,89%)

c. Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya

Terlaksananya pemeliharaan /Service AC Kantor,Komputer, dan Printer

Dengan Pagu Dana sebesar Rp.6.450.000,00

Realisasi capaian kinerja dari kegiatan ini 100,00 %.

Realisasi Keuangan sebesar Rp. 6.450.000,00 (100%)

II. Program Penanggulangan Bencana

1. Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

a. Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana gempa bumi dan Tsunami bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Dalam kegiatan ini juga secara langsung dipraktekkan atau disimulasikan respon menghadapi gempa Bumi dan Susur jalur evakuasi bila terjadi Tsunami.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di distrik Jayapura Utara, dengan total peserta sebanyak 50 orang.dengan pagu dana Rp.259.800.000,00

Realisasi capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 100 %.

Realisasi Keuangan Rp.259.395.000,00 (99,84)

b. Sub Kegiatan : Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Anggota Pusat Pengendalian Operasi Dimana telah dilakukan kegiatan magang di Pusdalops PB Provinsi Papua yang diikuti oleh 7 Orang Staff pada BPBD Kota Jayapura selama 4 Hari. Serta dilakukan Piket Pusdalops guna memantau situasi dan Kondisi keadaan cuaca sehingga dapat disampaikan dan diteruskan ke Masyarakat. Dengan pagu dana Rp.98.256.000,00

Realisasi capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 100 %

Realisasi Keuangan Rp.98.256.000,00 (100%)

c. Sub Kegiatan : Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Adapun yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan antara lain :

- **APBD Induk (Sumber Dana : DAU)**
 - Bangunan Pengaman Hamadi Hanurata dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 393.280.000,00
- **APBD Perubahan (Sumber Dana : DBH)**
 - Bangunan Pengaman Ardipura II Gunung RT 001/RW 009 Dengan Nilai Kontrak Kerja Sebesar Rp. 236.115.866,91
 - Bangunan Pengaman Masjid Jl. Bonsai Perum. Polda Buper Waena. Dengan Nilai Kontrak Kerja Sebesar Rp. 194.612.039,83
 - Bangunan Talud Pengaman APO Tugu APO Kali Mati, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 231.229.640,15

Dalam kegiatan ini juga, BPBD Kota Jayapura melakukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Jayapura dan juga berkoordinasi dengan pihak SATPOL PP dan PBD Provinsi Papua dalam hal pengawasan administrasi dan pelaksanaan pekerjaannya di lapangan.

Pelaksanaan kegiatan Penanganan Pascabencana di Kota Jayapura (meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana) dilakukan secara kontraktual melalui 5 (lima) tahapan dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu perencanaan pengadaan melalui penyedia, persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia oleh PPK, pelaksanaan pemilihan (melalui pengadaan langsung, seleksi dan tender), pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan.

Realisasi capaian kinerja fisik yang dicapai pada kegiatan ini sebesar 100 %.



Realisasi Keuangan Rp.1.391.832.626,00 (99,68%)

d. Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Tim Reaksi Cepat dalam merespon atau tanggap terhadap kejadian bencana di Kota Jayapura. Anggota Tim Reaksi Cepat terdiri dari BPBD Kota Jayapura, TNI, Polri, SAR, BMKG, OPD-OPD terkait, Tim Siaga Bencana Kelurahan, serta RAPI. Selain itu juga dalam kegiatan ini terdapat tugas piket/jaga malam untukantisipasi kejadian bencana atau TRC lebih cepat dalam merespon atau tanggap terhadap kejadian bencana. Jumlah anggota TRC adalah 30 orang. Pelaksanaan peningkatan kapasitas TRC melalui dengan pelatihan bongkar pasang tenda dan pengenalan aplikasi yang dapat digunakan saat bencana, sehingga lebih mudah dalam melakukan penginputan atau kaji cepat di lapangan.

Tim Reaksi Cepat juga melakukan pemantauan daerah rawan bencana dan melakukan monitoring untuk lokasi-lokasi yang terkena bencana.dengan Pagu dana Rp.170.000.00,00

Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah sebesar 100 %.

Realisasi keuangan sebesar Rp.170.000.000,00 (100%)

2. Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

a. Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan dasar penanggulangan bencana bagi korban bencana, seperti bantuan bahan pangan (beras, minyak goreng, mie instant, gula pasir, sarden, air mineral kemasan) dan sandang (Seragam SD/SMP).dengan pagu dana sebesar Rp.145.000.000,00

Realisasi capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah sebesar 100 %.

Realisasi keuangan Rp.145.000.000,00 (100%)

Perbandingan pencapaian kinerja untuk Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dalam Tabel 6 berikut.

**Tabel 6.
Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2022 dan Tahun 2023 BPBD Kota Jayapura**

| No. | Indikator Kinerja Utama | Target | Capaian 2022 | Capaian 2023 |
|--|---|------------|--------------|--------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | |
| 1. | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 34 stel | 100% | 100 % |
| 2. | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 2 Orang | 0% | 0% |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | |
| 1. | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 12 paket | 100% | 100 % |
| 2. | Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan | 2 paket | 100% | 100 % |
| 3. | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan | 3 paket | 100% | 100 % |
| 4. | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 1 dokumen | 100% | 100 % |
| 5. | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 laporan | 100% | 100% |



| No. | Indikator Kinerja Utama | Target | Capaian 2022 | Capaian 2023 |
|---|--|-----------|--------------|--------------|
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| 1. | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 2 laporan | 100% | 100 % |
| 2. | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 3 laporan | 99,27% | 98,00 % |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| 1. | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 2 Unit | 88,39% | 95,00 % |
| 2. | Jumlah kendaraan perorangan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perijinannya | 4 Unit | - | 98,00 % |
| 3. | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 10 Unit | - | 100 % |

| Indikator Kinerja Utama | Target | Capaian 2022 | Capaian 2023 |
|--|---------------|---------------------|---------------------|
| Jumlah warga negara Termasuk kelompok rentan di Kawasan rawan bencana kab.Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | 50 Orang | 100 % | 100 % |
| Jumlah Laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di Kawasan tempat tinggalnya | 1 Laporan | 100 % | 100 % |
| Jumlah dokumen penanganan pascabencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana | 1 Dokumen | 100 % | 100 % |
| Jumlah personal TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya | 30 Orang | 100 % | 100 % |
| Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 150 KK | 100 % | 100 % |

Bila dilihat dari hasil capaian kinerja di Tahun 2022 dan Tahun 2023 tidak banyak perubahan. Hal ini karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura berupaya keras untuk cepat tanggap/responsif terhadap kejadian bencana yang terjadi di Kota Jayapura, dengan melakukan kegiatan yang bersifat pencegahan atau mitigasi bagi masyarakat yang berada di daerah rawan bencana, melakukan monitoring ke daerah- daerah rawan bencana ataupun lokasi bencana dan juga pemberian bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana.

Selain itu Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Jayapura juga melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Jayapura dengan membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Namun tidak semua lokasi dapat dilakukan perbaikan, mengingat ketersediaan anggaran pemerintah



daerah yang terbatas. Selain itu, permasalahan hak ulayat masyarakat sempat juga menjadi kendala di lapangan, namun semua itu dapat teratasi berkat kerjasama semua pihak, baik BPBD Kota Jayapura, pihak penyedia dan tokoh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, untuk tetap menjaga konsistensi, kredibilitas dan tanggung jawab dari BPBD Kota Jayapura dan pihak penyedia, maka dilakukan pengawasan dari Kejaksaan Negeri Jayapura. Ini tentunya merupakan langkah kongkrit dari BPBD Kota Jayapura untuk pelaksanaan kegiatan lebih transparan, terarah, dan akuntabilitas.

Tabel 7.
Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2023 sampai dengan akhir periode Renstra

| No. | Indikator Kinerja Utama | Target Akhir Renstra | Realisasi Tahun 2023 | Tingkat Kemajuan |
|--|---|----------------------|---|------------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | |
| 1. | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 34 Stell | 34 Stell Baju Batik Tradisional Dan 6 stell PDH | 100% |
| 2. | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 6 Orang | 0% | 0% |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | |
| 1. | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 18 | 12 Paket | 66,66% |
| 2. | Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan | 2 paket | BBM Peralite & Dexlite serta Bahan makanan pencegahan Stuting | 100% |
| 3. | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan | 4 Paket | 3 Paket (Fotocopi, Penjilidan, Map dan Brosur) | 75,00% |
| 4. | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 1 Dokumen | 1 dokumen (Koran Cenderawasih Pos) | 100% |
| 5. | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 Laporan | 20 Laporan | 66,66% |



| No. | Indikator Kinerja Utama | Target Akhir Renstra | Realisasi Tahun 2023 | Tingkat Kemajuan |
|---|--|----------------------|--|------------------|
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| 1. | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 2 Laporan | 2 Laporan (Tagihan Telepon dan Internet) | 100% |
| 2. | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 3 Laporan | 3 Laporan | 100% |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| 1. | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 2 Unit | 2 Unit | 100% |
| 2. | Jumlah kendaraan perorangan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perijinannya | 5 Unit | 4 Unit | 80,00% |
| 3. | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 10 Unit | 10 Unit | 100% |



| Indikator Kinerja Utama | Target Akhir Renstra | Realisasi Tahun 2023 | Tingkat Kemajuan |
|--|-----------------------------|---|-------------------------|
| Jumlah warga negara Termasuk kelompok rentan di Kawasan rawan bencana kab.Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | 250 Orang | 50 Warga negara mengikuti Pelatihan Mitigasi Bencana dan Sosialisasi ke beberapa sekolah tentang pencegahan dan kesiapsiagaan | 20,00% |
| Jumlah Laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di Kawasan tempat tinggalnya | 1 Laporan | 1 Laporan, 12 Bulan | 100% |
| Jumlah dokumen penanganan pascabencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana | 1 Dokumen | 1 Dokumen , 4 Kegiatan dilaksanakan | 100% |
| Jumlah personal TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya | 40 Personil TRC | 30 Personil TRC dengan SK Walikota | 75,00% |
| Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 400KK | 150KK | 37,05% |

Tabel 8.
Effisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No. | Indikator Kinerja Utama | Persentase Capaian Kinerja | Persentase Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | |
| 1. | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 0% | 0% | 0% |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | |
| 1. | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 100% | 99,99% | 100% |
| 2. | Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 | 88,22% | 100% |



| No. | Indikator Kinerja Utama | Persentase Capaian Kinerja | Persentase penyerapan anggaran | Tingkat Efisiensi |
|---|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| 1. | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 100% | 70,19% | 85,00% |
| 2. | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 98,00% | 96,63% | 98,00% |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| 1. | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 95,00% | 92,72% | 95,00% |
| 2. | Jumlah kendaraan perorangan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perijinannya | 98,00% | 91,82% | 98,00% |
| 3. | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 100% | 100% | 100% |



| Indikator Kinerja Utama | Persentase Capaian Kinerja | Persentase penyerapan anggaran | Tingkat Efisiensi |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Jumlah warga negara Termasuk kelompok rentan di Kawasan rawan bencana kab.Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | 100 % | 99,84 % | 100% |
| Jumlah Laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di Kawasan tempat tinggalnya | 100 % | 100 % | 100% |
| Jumlah dokumen penanganan pascabencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana | 100 % | 99,68 % | 100% |
| Jumlah personal TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya | 100 % | 100 % | 100% |
| Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 % | 100 % | 100% |

Tabel 9.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan dan Kegagalan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

| No. | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Analisa Penyebab |
|--|---|----------|--|--|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | |
| 1. | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 34 Stell | 34 stel baju Batik Tradisional dan 6 stell PDH | Pada Target awal ada 34 Stell Baju Batik Tradisional untuk seluruh pegawai BPBD kota Jayapura, Pada realisasinya selain 34 Stell Baju batik tradisional yang tersedia terdapat juga penambahan 6 Stell Baju PDH bagi Pegawai yang baru bergabung dan yang belum memiliki, Tentunya penambahan tersebut melewati pengusulan lewat APBD Perubahan. |
| 2 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 2 Orang | Tidak terlaksana | Target tidak tercapai karena Pegawai mengikuti kegiatan yang di laksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Jayapura sehingga tidak mengeluarkan Anggaran. |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | |
| 1. | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 12 Paket | 12 Paket | |
| 2. | Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan | 2 Paket | 2 Paket | |
| 3. | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan | 3 Paket | 3 Paket | |



BPBD Kota Jayapura

| | | | | |
|----|--|------------|------------|--|
| 4. | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |
| 5. | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | 20 Laporan | |

| No. | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Analisa Penyebab |
|---|--|-----------|-----------|--|
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| 1. | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 2 Laporan | 2 Laporan | |
| 2. | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 3 Laporan | 3 Laporan | Untuk iuran BPJS Kesehatan tidak dilaksanakan / Dibayarkan |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| 1. | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 2 unit | 2 unit | |
| 2. | Jumlah kendaraan perorangan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perijinannya | 4 unit | 4 unit | |
| 3. | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 10 Unit | 10 Unit | |



| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Analisa Penyebab |
|--|---------------|-----------------------|---|
| Jumlah warga negara Termasuk kelompok rentan di Kawasan rawan bencana kab.Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | 50 Orang | 50 Orang | Sebanyak 50 Orang mengikuti Pelatihan dan pencegahan mitigasi bencana. |
| Jumlah Laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di Kawasan tempat tinggalnya | 1 Laporan | 1 Laporan | Melakukan piket jaga Pusat pengendalian operasi selanjutnya laporan piket diolah dan di share ke Masyarakat lewat sosial media. |
| Jumlah dokumen penanganan pascabencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana | 1 Dokumen | 1 Dokumen (4 lokasi) | Terjadi peningkatan pekerjaan yang semula pada APBD Induk berjumlah 1 kegiatan kemudian lewat APBD Perubahan ada 3 Kegiatan yang dilaksanakan. Total 4 Kegiatan selesai dilaksanakan dengan baik. |
| Jumlah personal TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang Anggota TRC lengkap dengan SK Walikota |
| Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 150 KK | 150 KK | Khusus penerima bantuan Logistic pada setiap terjadi bencana lewat posko induk BPBD menerima Bantuan berupa sembako dll sehingga dapat tersalurkan ke warga dan melebihi target awal. |

Tabel 10.
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

| No. | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Program/Kegiatan |
|--|---|------------|---|---|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | |
| 1. | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 34 Stell | 34 Stell Baju batik Tradisional dan 6 Stell PDH | Target Tercapai dan ada penambahan 6 stell PDH lewat pengusulan pada APBD Perubahan |
| 2 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 2 Orang | Tidak terlaksana | Target tidak tercapai karena Pegawai mengikuti kegiatan yang di laksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Jayapura sehingga tidak mengeluarkan Anggaran |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | |
| 1. | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 12 Paket | 12 Paket | |
| 2. | Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan | 2 Paket | 2 Paket | |
| 3. | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan | 3 Paket | 3 Paket | |
| 4. | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |
| 5. | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 Laporan | 20 Laporan | |



| No. | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Program/Kegiatan |
|---|--|-----------|-----------|--|
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| 1. | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 2 Laporan | 2 Laporan | |
| 2. | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 3 Laporan | 3 Laporan | Untuk iuran BPJS Kesehatan tidak dilaksanakan / Dibayarkan |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| 1. | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 2 Unit | 2 Unit | |
| 2. | Jumlah kendaraan perorangan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya | 4 Unit | 4 Unit | |
| 3. | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 10 Unit | 10 Unit | |



| Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Program/Kegiatan |
|--|---------------|-----------------------|---|
| Jumlah warga negara Termasuk kelompok rentan di Kawasan rawan bencana kab.Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | 50 Orang | 50 Orang | Sebanyak 50 Orang mengikuti Pelatihan dan pencegahan mitigasi bencana. |
| Jumlah Laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di Kawasan tempat tinggalnya | 1 Laporan | 1 Laporan | Melakukan piket jaga Pusat pengendalian operasi selanjutnya laporan piket diolah dan di share ke Masyarakat lewat sosial media. |
| Jumlah dokumen penanganan pascabencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana | 1 Dokumen | 1 Dokumen (4 lokasi) | Terjadi peningkatan pekerjaan yang semula pada APBD Induk berjumlah 1 kegiatan kemudian lewat APBD Perubahan ada 3 Kegiatan yang dilaksanakan. Total 4 Kegiatan selesai dilaksanakan dengan baik. |
| Jumlah personal TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang Anggota TRC lengkap dengan SK Walikota |
| Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 150 KK | 150 KK | Khusus penerima bantuan Logistic pada setiap terjadi bencana lewat posko induk BPBD menerima Bantuan berupa sembako dll sehingga dapat tersalurkan ke warga dan melebihi target awal. |

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura Tahun 2023 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta sub kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura di Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan sangat baik, dari segi realisasi capaian anggaran dan capaian kinerja (realisasi fisik).

Terlaksananya tugas-tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura tidak terlepas dari dukungan instansi-instansi terkait dan seluruh stakeholder yang pada dasarnya merupakan mitra kerjasama dan koordinasi, baik dalam pelaksanaan pra bencana, tanggap darurat bencana maupun pasca bencana.

Mengenai keberhasilan, masalah, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilihat sebagai berikut :

A. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain :

1. Tersedianya anggota Tim Reaksi Cepat yang merupakan gabungan dari stakeholder kebencanaan dalam merespon kejadian bencana ataupun memberikan informasi kepada masyarakat di Kota Jayapura.
2. Adanya koordinasi yang baik antara BPBD Kota Jayapura dengan BNPB RI, sehingga dapat memberikan perhatian dan bantuan yang lebih kepada masyarakat Kota Jayapura.
3. Adanya pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana sehingga masyarakat dapat kembali merasakan manfaatnya.

B. Masalah

Beberapa masalah yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura dalam pelaksanaan tugas adalah :

- Adanya hak ulayat masyarakat yang sempat mengganggu dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan;

- Keterbatasan peralatan kebencanaan yang dimiliki oleh BPBD Kota Jayapura;
- Keterbatasan anggaran dari APBD Kota Jayapura sehingga dalam menangani bencana yang terjadi belum optimal;
- Tenaga teknis yang masih terbatas jumlahnya pada BPBD Kota Jayapura.

C. Pemecahan masalah

Pemecahan masalah yang harus dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Jayapura adalah :

- Koordinasi antara Pemerintah dan tokoh adat serta tokoh masyarakat lebih baik, sehingga apabila ada pembangunan sarana dan prasarana perlu didukung semua pihak
- Penyediaan anggaran kebencanaan, baik untuk penyediaan peralatan kebencanaan maupun kegiatan pengurangan risiko bencana harus ditingkatkan

Dalam perkembangannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura masih terdapat banyak kekurangan, antara lain : masih perlunya peningkatan kapasitas dan kemampuan personil/aparat penanggulangan bencana melalui sertifikasi kompetensi profesi kebencanaan, kurangnya ketersediaan anggaran kebencanaan dari Pemerintah Daerah, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan guna mencegah resiko bencana, serta sarana dan prasarana yang mendukung pencegahan dan pengurangan resiko bencana belum memadai.

Disamping faktor-faktor kelemahan yang menjadi penghambat tersebut, tentu terdapat juga faktor yang menjadi kekuatan, diantaranya motivasi dan semangat serta mulai timbulnya kesadaran dan dukungan masyarakat serta praktisi dunia pendidikan dalam penanggulangan bencana secara perlahan namun pasti, yang merupakan sumber energi baru bagi segenap komponen dalam berpartisipasi langsung maupun tidak langsung terhadap penanggulangan bencana di Kota Jayapura.

Jayapura, 15 Februari 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA JAYAPURA


ASEP AKBAR M. KHALID, ST., M. Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19770214 201004 1 00



LAMPIRAN

DOKUMENTASI

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1. Komputer



2. Modem



3. UPS



4. Layar Proyektor



5. Printer



6. Dokumentasi Laporan Pencegahan Stunting



DOKUMENTASI

Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

Distrik Jayapura Utara











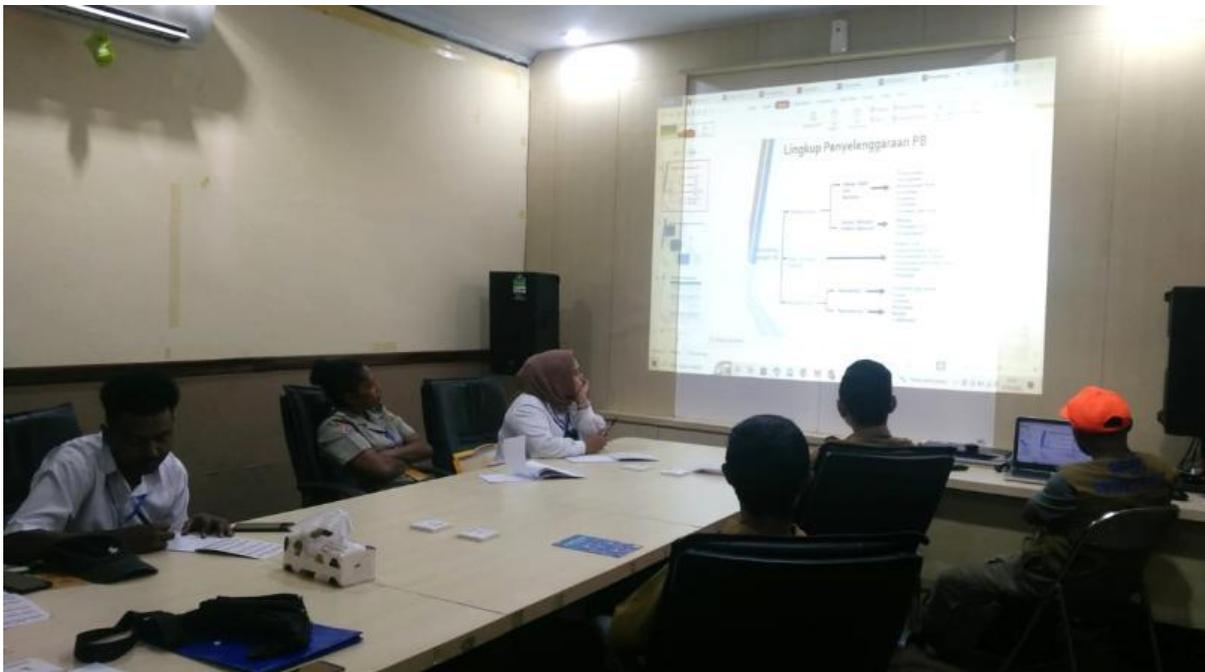


DOKUMENTASI

Sub Kegiatan : Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota











DOKUMENTASI

Sub Kegiatan : Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

1. Bangunan Pengaman Hamadi Hanurata



Kondisi 10 %



Kondisi 50 %



Kondisi 100 %

2. Bangunan Pengaman Ardipura



Kondisi 10 %



Kondisi 50%



Kondisi 100 %

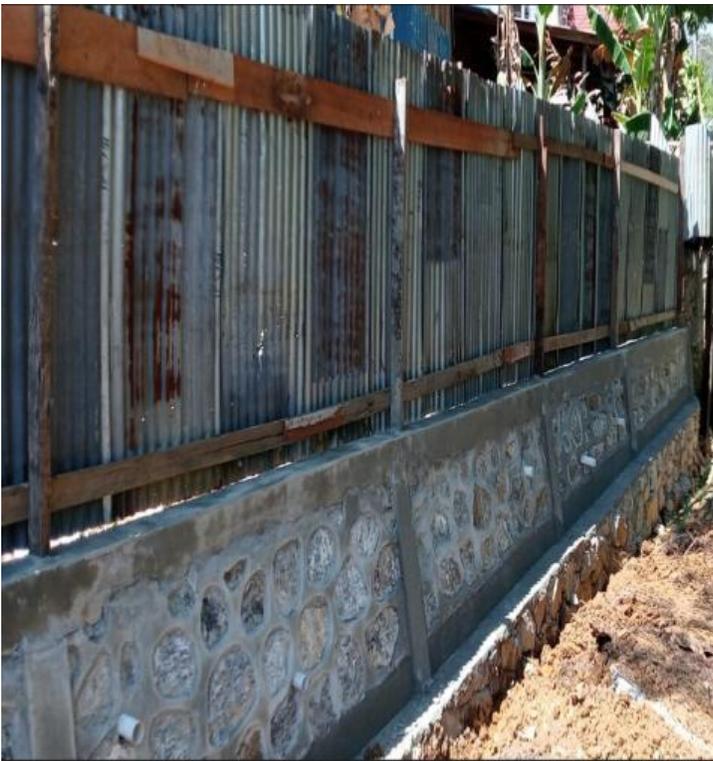
3. Bangunan Pengaman Mesjid Jalan Bonsai Perum. Polda Buper Waena.



Kondisi 10 %



Kondisi 50 %



Kondisi 100 %

4. Talud APO Tugu APO Kali Mati - Kelurahan Bhayangkara



Kondisi 10%



Kondisi 50 %



Kondisi 100 %

DOKUMENTASI
Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas TRC Bencana
Kabupaten/Kota

1. Kegiatan pelatihan TRC



2. Pengembangan Kapasitas TRC Simulasi penyelamatan Korban banjir





Piket TRC



DOKUMENTASI Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

1. Penyerahan bantuan pada korban bencana











2. Kebutuhan Dasar Korban Bencana













DOKUMENTASI

Penandatanganan MOU antara BPBD Kota Jayapura & Kejaksaan Negeri Jayapura



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA JAYAPURA TIPE B

Lampiran II : Peraturan Walikota Jayapura
 Nomor : 32 Tahun 2016
 Tanggal : 30 Desember 2016

